

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 28**

**2008**

**SERI : A**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR 28 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA BULAN OKTOBER  
SEBELUM PENETAPAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2008  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terdapat beberapa pengeluaran belanja bulan Oktober yang harus dilakukan untuk kelancaran dan kesinambungan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Nomor 28 menyatakan bahwa diantara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan pasal baru yaitu Pasal 105A ayat (1) dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan ayat (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang *bersifat tetap* seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka penggunaan anggaran belanja bulan Oktober sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 10 saeri D):
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan perencanaan Pembangunan Daerah pemerintah Kota Bekasi ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Pengawasan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bekasi(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kependudukan,catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Bekasi(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Sosial, Perlindungan dan Memperdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan pasar Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri D);
21. Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 21 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 23 Seri D);
24. Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 25 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2003 Nomor 26 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Memperdayaan Perempuan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 27 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 28 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 29 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 30 Seri D);

30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 31 Seri D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi(Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 32 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Bekasi(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah administrasi Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri D)Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
34. Peraturasn Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);
35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal daerah di Kota Bekasi(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 02 Seri A);
36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
38. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 06 Tgahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11 Seri A);

39. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2008 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri A);

Memperhatikan :1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

- 2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 12 Seri A);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA BULAN OKTOBER SEBELUM PENETAPAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2008 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

### **BAB 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bekasi
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bekasi tentang Penggunaan Anggaran Belanja sebelum Penetapan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
7. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam periode anggaran tertentu.
8. Pedoman penyusunan APBD adalah pedoman penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Permedagri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008.

## **BAB II**

### **BESARAN ANGGARAN DAN MEKANISME PENCAIRAN**

#### **Pasal 2**

Rincian dan besaran anggaran belanja yang bersifat tetap, tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 3**

Dasar pencairan anggaran belanja sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Walikota ini dengan diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal

**WALIKOTA BEKASI**

Ttd/Cap

**H. MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya

NIP. 010 081 186

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR**

**SERI**